PROGRES ASISTENSI PETA TATA RUANG

# RAPAT PLENO RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BUKITTINGGI

Berdasarkan Undang-undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa jangka waktu RTRW Nasional adalah 20 tahun. RTRW Nasional dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan kurang dari 5 tahun jika terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan/atau keadaan yang bersifat mendasar (bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah).

Pada Rabu, 9 November 2016, rapat pembahasan akhir perpetaan revisi peta RTRW Kota Bukittinggi dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Utama Badan Informasi Geospasial Peserta rapat berasal dari Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yaitu terdiri atas Walikota Bukittinggi, Sekertaris Daerah Kota Bukittinggi, Kepala Bappeda Kota Bukittinggi serta tim teknis penyusun Revisi RTRW Kota Bukittinggi. Tim yang berasal dari Badan Informasi Geospasial terdiri atas Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang beserta staf, perwakilan Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim serta perwakilan Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama.

Paparan teknis proses dan hasil validasi peta revisi RTRW Kota Bukittinggi disampaikan oleh Rakyan Paksi Nagara sebagai staf teknis Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas. Peta dasar yang digunakan berasal dari Peta RBI skala 1:10.000 yang digeneralisasi ke skala 1:25.000 menggunakan foto udara Kota Bukittinggi tahun perekaman 2014 (foto udara yang sama yang digunakan untuk pembuatan RBI skala 1:10.000). Setelah melalui serangkaian asistensi dan supervisi yang terdiri dari pemeriksaan terhadap peta dasar, peta tematik, peta rencana, dan album peta, maka peta revisi RTRW Kota Bukittinggi dinyatakan layak mendapat Rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial. [Diastarini, 2016]

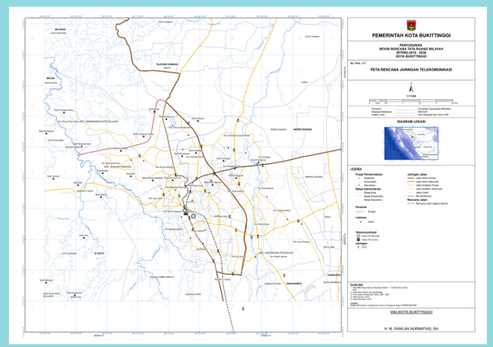


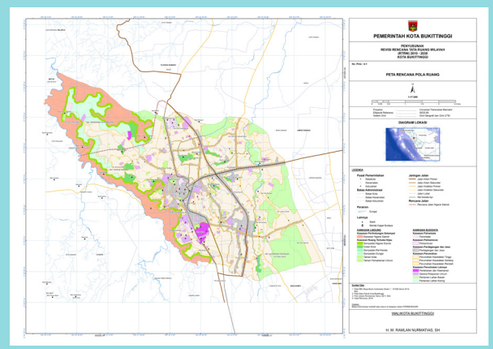


# DUA RDTR DI KAB. GROBOGAN DAPATKAN REKOMENDASI PERPETAAN DARI BIG

Proses penyusunan peta rencana tata ruang wajib dikonsultasikan kepada BIG sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Proses konsultasi tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa lampiran peta sudah layak untuk dijadikan sebagai lampiran Peraturan Daerah RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Selain itu, harus dipastikan bahwa peta RDTR yang disusun sudah memenuhi kaidah perpetaan skala besar. Proses konsultasi tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk edukasi tentang pemetaan kepada pemerintah daerah.

Pada Selasa, 11 November 2016, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) menerbitkan dua rekomendasi perpetaan RDTR. RDTR tersebut adalah RDTR BWP Klambu dan BWP (Batas Wilayah Perencanaan) Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Acara ini dihadiri Kepala Pusat PTRA, Mulyanto Darmawan, dan Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang, Habib Subagio, Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan, Pudjo Albacrun, didampingi oleh Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Afi Wildani.

Pada tahun 2016, Kabupaten Grobogan menyusun empat RDTR, yaitu BWP Toroh, Grobogan, Klambu dan Ngaringan. BWP Klambu dan Ngaringan dapat diselesaikan pada tahun ini, sedangkan BWP Toroh dan Grobogan masih dalam proses penyelesaian peta. Dalam proses penyusunannya, Kabupaten Grobogan senantiasa berkonsultasi kepada BIG secara intensif. Sumber data yang digunakan adalah citra satelit Worldview tahun perekaman 2014. [Fuad Hasyim, 2016]

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

**Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :**

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp. : (021) 8752062-63
Fax : (021) 8752064
Email : redaksi.ptra@gmail.com
Website : www.big.go..id

Edisi IV - Desember 2016

# TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA DAN ATLAS

## CATATAN BERANDA

*Alhamdulillahirrobbil 'alamin*, penghujung akhir tahun 2016 untuk BIG sungguh membahagiakan. Pemimpin baru BIG akhirnya ditetapkan presiden dan resmi dilantik pada tanggal 5 Desember 2016 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Segenap redaksi *Newsletter* dan staf PPTRA mengucapkan selamat atas pelantikan Prof Dr. Hasanuddin Zainal Abidin, M.Eng selaku kepala BIG yang baru.

Guru besar ITB Bandung akan meneruskan estafet kepemimpinan BIG dari Dr. Priyadi Kardono, M.Sc. Melalui beranda ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Priyadi. Kami percaya bahwa pemimpin yang jujur, bebas konflik, dan adil yang selalu dipegang pimpinan BIG, akan diteruskan oleh profesor ilmu geodesi ini, khususnya dalam mendukung program penyelenggaraan IG.

Figur Prof. Dr. Hasanuddin sudah tidak asing lagi bagi kalangan survei dan pemetaan dan juga BIG. Semoga di bawah kepemimpinan beliau BIG secara umum makin maju dan profesional dalam pelayanan publik terkait penyediaan informasi geospasial, baik IG dasar, IG tematik maupun pembangunan infrastruktur IG untuk berbagai segi kehidupan dan pembangunan nasional. Kami PPTRA juga akan semakin terpacu menjadi lebih baik dalam menyusun program dan melaporkannya dalam *Newsletter* ini.

Khusus program pemetaan tata ruang, dinamika sumberdaya, dan atlas, dukungan pimpinan sangat penting untuk menciptakan optimalisasi produk dan kreativitas program. Program pemanfaatan IG, kebijakan dan pembinaan IGT serta pemetaan detil tata ruang, dinamika sumberdaya, dan atlas akan terus menjadi kegiatan utama PPTRA. Dalam rapat monitoring bulan November yang dipimpin oleh Deputi IGT Dr. Nurwadjedi, pencapaian program PPTRA sekitar 74% untuk penyerapan anggaran sekitar 85% untuk capaian fisik kegiatan. Diprediksi PPTRA akan mencapai penyerapan anggaran sekitar 95% pada akhir Desember 2016 dan capaian fisik 100%. Semoga hasil-hasil program PPTRA bermanfaat untuk publik.

Selamat membaca.

## ISU STRATEGIS & INFO KEBIJAKAN

# INTEGRASI NERACA SUMBERDAYA ALAM SUATU KEHARUSAN

Menindaklanjuti hasil sosialisasi penyusunan neraca sumberdaya alam yang dilaksanakan di beberapa kota seperti Makassar, Medan, dan Banten selama tahun 2016 diperoleh masukan bahwa daerah memerlukan metode integrasi neraca sumberdaya alam. Integrasi Neraca SDA adalah proses menggabungkan empat komponen neraca sumberdaya lahan yaitu hutan, lahan, air, dan mineral batubara (minerba) sehingga didapat pemahaman menyeluruh hubungan antar neraca tersebut. Seberapa jauh konversi lahan yang terjadi pada kawasan hutan dan non hutan berpengaruh terhadap ketersediaan air atau bagaimana pengaruh eksplorasi minerba terhadap kawasan hutan dan non hutan dapat diketahui manakala dilakukan integrasi data neraca tersebut.

Menurut Undang-undang (UU) 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa neraca SDA adalah instrumen ekonomi yang dapat digunakan untuk memonitor perkembangan wilayah. Selain itu neraca dapat digunakan untuk bahan *review* peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan dan kebijakan nasional. Keinginan meninjau ulang tata ruang dengan data neraca sejalan dengan surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penetapan Tim Revisi peninjauan kembali tata ruang No 15.1 tanggal 6 Januari 2016. Tim beranggotakan sekitar 11 instansi termasuk melibatkan Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG sebagai anggota. Selain UU yang mewajibkan pemerintah daerah menyelesaikan neraca spasial, pada masa lalu terdapat Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Bakosurtanal. Sesuai dengan perkembangan kebijakan, tampaknya SEB tersebut patut diperbaharui.

Tim Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya melakukan serangkaian kegiatan dalam mengantisipasi kebijakan tersebut. Melalui kerja sama dengan Fakultas Geografi UGM telah diselesaikan metode integrasi neraca SDA dan sekaligus telah diujicobakan pada dua wilayah yaitu di Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara. Ke depan, tantangan kegiatan pemetaan dinamika sumberdaya semakin tinggi. Untuk itu saatnya kerja keras, cerdas, mawas, tuntas, santun, dan iklas untuk peningkatan produk Bidang Dinamika Sumberdaya. [Mulyanto Darmawan, 2016]

**REDAKSI:**
| **Penanggung Jawab :** Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | **Tim Redaksi:** Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
**Editor:** Fakhruddin Mustofa , Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Ellen Suryanegara, Marhensa Aditya Hadi, Chintia Dewi, Rochmad Budi S., I Made Dipta S.|
| **Desain Tata Letak:** Ellen Suryanegara, Reka Bayu Aji |

## POTRET KEGIATAN

# GEO-LITERASI UNTUK SISWA TUNANETRA

Kegiatan pembinaan di SLB ABCD Muhammadiyah Palu dilakukan pada tanggal 9-10 November 2016, diikuti oleh 24 siswa tunanetra. Sebagian besar peserta berasal dari SLB ABCD Muhammadiyah Palu, sebagian kecil merupakan perwakilan siswa SLB dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Sigi.

Media atlas taktual ini dapat menjadi sarana yang cukup efektif dalam menyampaikan IG kepada para difabel netra. Muatan informasi dalam atlas taktual menjabarkan makna geospasial secara mendasar yaitu aspek keruangan yang meliputi lokasi, letak, dan posisi suatu obyek. Literasi geospasial tidak sebatas verbal, tetapi mereka memahami langsung lewat wahana atlas taktual.

Dalam catatan PPTRA, Sulawesi Tengah menjadi provinsi yang ke 15 sebagai wilayah pembinaan membaca (literasi) peta melalui atlas taktual. PPTRA akan melanjutkan kegiatan ini di 19 provinsi lain, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. [Fakhruddin Mustofa, 2016]

# FGD III PENYUSUNAN DATASET DINAMIKA SUMBERDAYA ALAM TERPADU LINGKUP KAB/KOTA

Sumberdaya alam tidaklah tak terbatas sehingga pemanfaatannya harus mempertimbangkan aspek keseimbangan ekologis serta keberlanjutan. Melalui neraca sumberdaya alam, kondisi sumberdaya alam serta perubahannya dapat diidentifikasi dan dianalisis agar pemanfataannya dapat dilakukan secara bijaksana. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan Dataset Dinamika Sumberdaya Alam Terpadu pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Setelah *Focus Group Discussion* (FGD) I (Jakarta, 24 Juni 2016) dan II (Malang, 28 September), FGD III dilaksanakan di Bandung pada 4 November 2016. Bertempat di Hotel Grand Cokro Bandung, kegiatan FGD III dihadiri oleh Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc), Kepala Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya (Drs. Sri Daryaka, M.Sc), tim teknis, serta narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN). Perwakilan dari KLHK adalah Ir. Nurhayati, M.Si (Kepala Seksi Inventarisasi Nasional, Ditjen Planologi Kehutanan) sedangkan perwakilan dari Kemen ATR/BPN adalah Dicky Qoharuddin (Direktorat Penatagunaan Tanah).

Pada FGD III, yang merupakan FGD terakhir dari rangkaian kegiatan ini, banyak masukan yang diperoleh. Masukan yang disampaikan tidak hanya terkait produk yang sudah dihasilkan dari kegiatan ini (geodatabase, album peta, dan buku populer), namun juga peningkatan kualitas kegiatan Penyusunan Dataset Dinamika Sumberdaya Alam Terpadu di tahun-tahun mendatang. [Sri Eka Wati, 2016]

# PEMETAAN DINAMIKA WILAYAH PERKOTAAN

Perubahan penggunaan lahan terjadi akibat beragam aktivitas manusia yang dilakukan pada lahan tersebut. Kawasan perkotaan yang merupakan pusat aktivitas manusia menjadi wilayah yang mengalami perubahan secara dinamis. Tentunya, perubahan tersebut perlu diawasi dan dikontrol agar sesuai dengan peruntukannya sebagaimana telah diatur dalam rencana tata ruangnya. Menyikapi hal tersebut, diperlukan suatu kajian tentang model dinamika spasial wilayah perkotaan yang dapat menggambarkan secara spasial mengenai perubahan yang terjadi saat ini dan proyeksinya sebagai dasar kebijakan peruntukan penggunaan lahan.

Pemetaan dinamika wilayah perkotaan ini menggunakan pendekatan metode spasial dinamis. Spasial dinamis adalah metode yang menggambarkan perilaku hubungan timbal balik antara perubahan akvitas dengan perubahan pemanfaatan ruang pada suatu wilayah dalam dimensi waktu tertentu. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dinamika pola perubahan guna lahan dan dinamika perubahan aktivitas lain secara spasial. Komponen penting dalam spasial dinamis terletak pada teknik atau mekanisme dinamisnya. Dalam konteks kompetisi lahan, mekanisme atau prosedur yang digunakan melibatkan mekanisme konversi lahan yang dinamis terhadap waktu (*transition rule*).

Analisa dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh elemen informasi geospasial baik sumberdaya alam yang direpresentasikan dengan penggunaan lahan dan sumberdaya strategis. Analisis spasial akan memberikan gambaran laju konversi lahan perkotaan yang digunakan untuk fungsi permukiman ataupun kelas bangunan lain seperti industri dan jasa. Analisis statistik dilakukan untuk mengetahui progresivitas sumberdaya strategis pada unit administrasi. Sebagai hasil akhir, kegiatan ini akan mengintegrasikan perubahan penggunaan lahan dengan konsep pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang. [I Made Dipta Sudana, 2016]



# TOT BKPRD PROV. JAWA TENGAH DAN PPIDS UNIVERSITAS DIPONEGORO UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PETA RDTR

Saat ini BIG mencoba terobosan baru dalam rangka percepatan penyelenggaraan Peta RDTR dengan melibatkan perguruan tinggi yang juga merupakan perpanjangan tangan BIG yaitu Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Pelibatan PPIDS dan BKPRD pada percepatan penyelenggaraan Peta RDTR yaitu pada asistensi dan supervisi sampai dengan tahapan peta dasar. Kabupaten/Kota bisa melakukan asistensi dan supervisi Peta RDTR kepada PPIDS dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada BKPRD. Dengan mekanisme ini diharapkan akan membantu Kabupaten/Kota dapat mempercepat penyusunan Peta RDTR karena pada tahapan sumber data sampai dengan peta dasar Kabupaten/Kota tidak perlu melakukan asistensi dan supervisi ke BIG. Diharapkan dengan terselesaikannya tahapan Peta Dasar di PPIDS maka Kabupaten/Kota hanya tinggal melakukan asistensi peta tematik, peta rencana dan album peta ke BIG sehingga proses penyusunan Peta RDTR dapat lebih cepat. Meskipun demikian, sebelum mekanisme ini diterapkan, perlu dilakukan Training of Trainer (ToT) mengenai validasi Peta Rencana Tata Ruang, sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam melakukan asistensi dan supervisi antara PPIDS dengan BIG.

Pada tanggal 18 – 19 Oktober 2016 telah dilakukan Training of Trainer kepada PPIDS Universitas Diponegoro dan BKPRD Provinsi Jawa Tengah di Hotel Novotel Semarang. Acara ini dihadiri oleh lima (5) orang dosen Jurusan Teknik Geodesi dari PPIDS Universitas Diponegoro dan beberapa perwakilan dari BKPRD Provinsi Jawa Tengah. Acara yang dikemas selama dua (2) hari ini, dibuka oleh Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang, PPTRA, Habib Subagio, S.Si., M.Si. dan dilanjutkan dengan penyampaian materi ToT oleh tim asistensi dari PPTRA, BIG. Pada hari selanjutnya, dilakukan simulasi asistensi dan supervisi Peta RDTR.

Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari BKPRD Provinsi Jawa Tengah, PPIDS Universitas Diponegoro dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya upaya percepatan penyelenggaraan Peta RDTR ini diharapkan Kabupaten/Kota akan terbantu dalam penyusunan Peta RDTR. [Fuad Hasyim, 2016]

# STANDAR BASIS DATA KUGI RENCANA TATA RUANG AKAN SEGERA TERBIT

Dalam Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang diatur tentang pasal pengelolaan data rencana tata ruang. Pengelolaan data sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 dilakukan sejak pengumpulan data sampai dengan tersusunnya peta rencana tata ruang. Berbicara tentang pengelolaan data rencana tata ruang, tentunya tidak lepas dari aspek basis data, sebagai sebuah sistem pengelolaan data dan informasi geospasial tata ruang secara digital. Menjawab kebutuhan tersebut, disusunlah standar basis data rencana tata ruang yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).

Untuk mengakomodir kebutuhan standar basis data rencana tata ruang, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) NSPK Pemetaan Tata Ruang pada tanggal 9 November 2016. Salah satu pedoman yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah standar basis data rencana tata ruang. Hadir dalam FGD tersebut, Kepala Pusat PTRA, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc dan Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang, Habib Subagio, S.Si, M.Si. Narasumber yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain: Dr. Ir. Bambang Setyadji, M.Si, Dr. rer.nat. Rizqi Abdulharis dari program studi Teknik Geodesi ITB, Dr. Ir. Aca Sugandhy, M.Sc dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB dan Dr. Ir. Umar Mansyur, MT dari Universitas Pakuan.

FGD membahas penyusunan standar basis data rencana tata ruang. Standar basis data tersebut akan disusun sesuai dengan standar Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI). Hal tersebut sejalan dengan proses revisi Perda (Peraturan Daerah) RTRW yang mulai dikerjakan oleh pemerintah daerah. Pada tahap pertama, BIG fokus kepada pentingnya data spasial dalam format GIS. Tahapan selanjutnya, BIG akan fokus pada edukasi tentang pentingnya basis data IG rencana tata ruang yang terstandar. Basis data rencana tata ruang yang terstandar merupakan salah satu tujuan dalam konsep One Map Policy, yaitu : Satu Standar, Satu Referensi, Satu Basisdata, dan Satu Geoportal. [Fuad Hasyim, 2016]

## RESENSI BUKU

# EKONOMI REGIONAL: TEORI DAN APLIKASI

Ekonomi regional merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi dalam pembahasannya. Ilmu ini juga menerapkan prinsip ekonomi yang terkait dengan wilayah, sehingga lebih tepat untuk diaplikasikan dalam kebijakan pembangunan wilayah. Prinsip ini perlu diacu dalam mengatur kebijakan ekonomi wilayah maupun dalam menyusun rencana pembangunan wilayah.

Pada bagian awal, buku ini menyajikan pembahasan mengenai ruang lingkup ilmu ekonomi regional. Selanjutnya pembahasan masuk pada ilmu ekonomi seperti pendapatan regional, teori basis ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi wilayah, analisis potensi relatif perekonomian wilayah, dan analisis input-output perekonomian wilayah. Sementara pada bagian akhir pembahasan lebih ditekankan pada aspek kewilayahan, meliputi teori lokasi serta pembahasan tentang kota dan wilayah belakangnya.

Berbagai pembahasan yang telah diuraikan dalam buku ini dapat menjadi alat bantu analisis bagi pembaca yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi dan kelemahan suatu wilayah serta berbagai kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan demikian buku ini sesuai direkomendasikan untuk para akademisi dan praktisi terutamanya di bidang pembangunan wilayah. [Rochmad Budi, 2016]

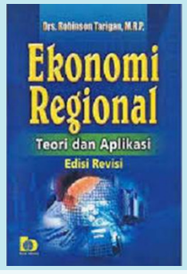


**Penyusun** : Drs. Robinson Tarigan, M.R.P.
**Penerbit** : Bumi Aksara
**Halaman** : 204 hal
**Tahun Terbit** : 2005